

Pengaturan Tata Hukum di Indonesia Kalau di Tinjau dari Kondisi Kekinian

Barly Halim Siregar¹, Syadzwina Rasyiah Iwani², Shindy Tamanda Rangkuti³, Aidil Habibi Nasution⁴, Eka Wahyuni⁵, Afwansyah Nugroho Sirait⁶, Nurul Hakiki Hasibuan⁷, Retina Putri Jelita⁸, Anisa Humayro Zakiva⁹, Maryam Indah Pratama¹⁰, Rajo Inal Hamonangan¹¹, Rahmat Syuhada¹².

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*putrijelitaretina@gmail.com*⁸

ABSTRACT

An important part of Indonesian constitutional law is the development of state law. This article discusses the development of the legal system, especially the constitution, laws, statutory regulations, statutory regulations and regional regulations. In this case, it is important to examine how public institutions such as the government, DPR, and judiciary are involved in making, implementing, and enforcing laws. Teksini uses legal methods and library research strategies in his research, namely legal research which focuses on legal principles, including agreements, statutes, principles, norms and rules. The constitution is a list of articles governing the general organization of the state, functions, business and administration of public institutions, the territory of the state, the situation of local communities and human rights. We can not only understand what the Constitution is, but also what it teaches. One thing we can learn from constitutions is that different ideas and methods are used from one country to another in implementing the constitution. Understanding changes in laws and regulations can help identify trends, issues, and reforms that can strengthen Indonesia's legal system. Apart from that, the constitution has many functions. One of its goals is to increase our citizens' interest in the Constitution by encouraging them to read the Constitution. The main goal is to increase public awareness of the Constitution.

Keywords: *constitution, development, law.*

ABSTRAK

Bagian penting dari hukum ketatanegaraan Indonesia adalah perkembangan hukum tata negara. Artikel ini membahas tentang perkembangan pranata hukum khususnya konstitusi, undang-undang, peraturan, dan peraturan daerah. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga-lembaga publik seperti pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan terlibat dalam pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Teksini menggunakan metode dan strategi penelitian yang diadopsi daribuku dalam penelitiannya. Ini adalah studi hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum, termasuk kontrak, undang-undang, prinsip, standar, dan undang-undang. Konstitusi adalah seperangkat pasal yang mengatur organisasi umum negara, cara kerja, fungsi dan pengelolaan lembaga-lembaga publik, wilayah negara, susunan masyarakat, dan hak asasi manusia. Kita tidak hanya bisa memahami apa itu Konstitusi, tapi juga apa yang diajarkan di dalamnya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari konstitusi adalah bahwa setiap negara menggunakan ide dan metode yang berbeda dalam melaksanakan konstitusi. Memahami perubahan peraturan perundang-undangan dapat membantu mengidentifikasi tren, permasalahan, dan reformasi yang dapat memperkuat hukum di Indonesia. Selain itu, konstitusi mempunyai banyak fungsi. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan minat warga negara terhadap Konstitusi dengan mendorong mereka untuk membacanya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang UUD.

Kata kunci : konstitusi, pembangunan, hukum.

PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah sistem asas dan landasan pedoman yang mengawasi serta mengatur tingkah laku manusia. Menurut sebagian orang, hukum adalah suatu asas tertulis maupun asas yang tidak pernah tertulis yang memiliki kekuatan dalam mengatur masyarakat dan dapat diberi sanksi (Kahar, 2019). Kejahatan bisa dikurangi asalkan ada peraturan perundang-undangan. Batasan menghalangi manajer untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Undang-undang ini juga berfungsi untuk melindungi tanggung jawab dan kepentingan hak semua masyarakat warga bernegara. Oleh sebab itu, negara membutuhkan undang-undang yang betul (Abqa et al., 2023). Masalah sekarang akan terselesaikan apabila undang-undang yang diusulkan diterapkan. Menurut peraturan yang berlaku saat ini, masalah ini harus ditangani sesuai dengan hukum.

Secara umum tujuan hukum secara umum adalah menjamin kesejahteraan, serta perdamaian dan keamanan. Aspek Hukum juga memiliki banyak tujuan serta kepentingan berbeda. Kemunculan hukum akan menjamin perkembangan masyarakat. Hubungan serta Interaksi dalam masyarakat selalu dipantau dan diadaptasi seiring pemerintah menentukan pilihannya (Susiani, 2023). Aspek Hukum juga menjadi senjata untuk menjamin rasa keadilan dan mendorong Aspek pembangunan. Hukum di tiap negara berbeda-beda. Dengan metode ini, masyarakat dapat mengetahui segala peraturan UU terkait (Lestari et al., 2023). Ada banyak bidang hukum, termasuk Aspek hukum akan tata negara, Aspek hukum Yang internasional, dan Aspek hukum Akan administrasi.

Tujuan penulis adalah menunjukkan atau menentukan Aspek Hukum Dasar, Aspek tujuan utama artikel ini adalah untuk menambahkan wawasan serta pemahaman kita terhadap konsep ini, karena Hukum Dasar adalah hukum yang pasalnya perlu kita cerna serta pahami (Michael, 2020).

Berdasarkan informasi yang diungkapkan, penulis mulai mengkaji proses pembentukan, penciptaan dan pengutamaan hukum dalam sistem hukum negara, dimulai dari pemahaman konstitusi tentang subjeknya (Sari dan Zainuddin, 2021). Hal ini bermaksud untuk membangun kerangka Aspek hukum, memelihara konsistensi dan meninjau serta memastikan bahwa seluruh peraturan mematuhi segala prinsip dasar dan kebutuhan lapisan masyarakat (Jannah dan Fatmawati, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam Jurnal ini memakai teknik hukum dan segala strategi tinjauan pustaka yang ada dalam penelitian ini, khususnya pada penelitian akan hukum yang berfokus pada asas-asas hukum, yang ikut terkait dengan kontrak, undang-undang, norma, asas, dan peraturan (Haryanto dan Hadadde, 2021). Artikel ini berfokus terhadap permasalahan hukum dari segala sudut pandang yurisprudensi (kasus hukum) dan hukum (litigasi). Salah satu isi proses terhadap legislasi adalah analisis undang-undang mengenai permasalahan hukum yang diperiksa. Sedangkan studi kasus menggunakan penelitian nyata untuk mencerna serta menganalisis dan memahami segala prinsip hukum (Nurwanto et al., 2022).

Di jurnal ini penulis menggunakan informasi tambahan termasuk akan data yang primer, serta sekunder dan universitas. Anggaran dasar adalah dokumen hukum yang penting. Sementaraitu, sumber hukum dan dokumen pelengkap memberikan dan mengomentari dokumen hukum utama (Iqbal & Sastrawati, n.d.). segala dokumen hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah segala buku yang ditulis oleh para ahli hukum, buku-buku hukum yang memuat segala artikel yang berkesinambungan dengan topik penelitian, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan penelitian. Contoh teks terpercaya pada tingkat ketiga adalah kamus terpercaya, sumber internet, buku, karya referensi, dan ensiklopedia. Merupakan buku pendamping yang menyuguhkan informasi dan penjelasan serta pemahaman tentang dokumen hukum penting dan tambahan (Prasetio, 2021).

Dokumen-dokumen dasar hukum yang berhubungan dengan segala permasalahan yang disebutkan dalam penulisan ini diperoleh dengan penelusuran dan pemeriksaan literatur, khususnya metode dalam pengumpulan data, selain dengan membaca dokumen-dokumen hukum dan sumber-sumber resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami aturan dasar Hukum

Dasar adalah suatu jenis hukum yang akan mengatur segala hubungan antara kekuasaan Yang legislatif, dengan eksekutif, dan yudikatif dalam pemerintahan nasional. adapun beberapa negara tidak mempunyai konstitusi, semua negara memiliki undang-undang kota atau negara bagian yang ditetapkan dan disepakati. Segala Hukum adat, Undang undang, perjanjian, kasus hukum, serta segala prinsip dan peraturan internasional merupakan contoh dari prinsip-prinsip tersebut (Hadi dan Gandryani, 2022). Tingkatan hukum yang lain juga mengatur asas-asas dan segala hukum yang ditetapkan dalam urusan-urusan masyarakat adalah Undang-undang Dasar. Hukum dasar yang mengatur urusan pemerintahan, termasuk struktur dan manajemen pemerintahan, tanggung jawab, instrumen dan hubungan antar lembaga pemerintah (Hadi dan Gandryani, 2022). Para sarjana memiliki pemahaman yang luas tentang Van der Pot serta pengetahuan umum. < Seorang ahli dalam hal ini bidang 'Hukum Dasar' dijelaskan atas dasar bahwa UUD Nomormemuat aturan-aturan yang menentukan batas-batas dan kekuasaan pejabat-pejabat yang berwenang serta hubungannya satusama lain dan dengan orang lain. Scholten memberikan pendapat ahlinya tentang Van der Pot.

Seperti van der Pot, ia percaya bahwa konstitusi adalah seperangkat undang-undang institusional, bukan undang-undang negara. Scholten merangkum bahwa lembaga publik mengatur berfungsinya lembaga publik terutama tugas, hak dan tanggung jawab setiap individu terhadap individu lainnya (Lubis, 2021). Ini meringkaskan rangkaian pakar akan Apeldoorn sebelum berganti ke contoh hukum dasar. Menurutnya, Undang-Undang Dasar Nomor secara garis besar mencakup hukum Ketatanegaraan dan hokum administrasi, yang tidak seiras dengan hukum pokok dalam aspek arti sempit, tetapi dikatakan juga “hukum segala tata negara dalam arti sempit” mengingat sifat dan temperamennya. para pemimpin negara. Pelajari bahwa hal ini

dicakup oleh Konstitusi, antara lain. Itu sebabnya banyak sekali perusahaan di Indonesia. UU Pokok mengatur banyak lembaga, antara lain Presiden, DPR, DPD dan lain-lain. Selain itu, hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah diatur oleh Konstitusi. Ini adalah contoh tentang apa yang penting dalam konteks konstitusi suatu negara. Konstitusi mempertimbangkan berbagai doktrin dan praktik yang diterima secara internasional. Undang-Undang Dasar mengatur berbagai persoalan mengenai hubungan antara segala aspek lembaga negara dan masyarakat, termasuk segala pembentukan, serta penyelenggaraan, dan penyelenggaraan negara untuk mendapatkan tujuan yang sah. Meskipun banyak negara bagian tidak mempunyai konstitusi tertulis, sebagian besar negara bagian disusun oleh konstitusi yang berfungsi dan bertujuan sebagai hukum dasar yang seragam yang menjadikan serta membentuk suatu negara. Oleh karena itu, 'hukum dasar' atau proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan prinsip-prinsip dasar administrasi publik adalah nama lain dari hukum dasar.

1. Hukum Tata Negara

Hukum Dasar Menurut para ahli UUD adalah sebagai berikut:

- a. Van der Pot menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah suatu sistem peraturan yang mendefinisikan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab serta dikendalikan, fungsinya, berkaitan antara lembaga-lembaga tersebut dan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat nasional.
- b. Menurut Van Vollen Hoven, lahir pada tahun, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan di berbagai tingkat dan hukum yang akan diterapkan pada tingkat tersebut.
- c. Menurut Logemann, konstitusi adalah seperangkat undang-undang yang mengatur pemerintahan. hal. Menurut Mac Iver,
- d. meskipun negara adalah sebagai entitas politik dalam lapisan masyarakat, namun negara bukan semata hanya bagian dari lapisan masyarakat. Kerangka akan negara atau organisasi adalah suatu organisasi dalam lapisan masyarakat.
- e. Dalam buku Ilmu Hukum Indonesia, Guru Besar Kusumadi Pudjosewojo, S.H. "Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan negara (persatuan atau kesatuan) dan pemerintahan (monarki atau republik), wakil masyarakat yang tertinggi dan berada di atas hukum, serta yang berada pada tingkat paling bawah (hierarki). Ia menentukan lingkungan sekitar anggota keluarga hukum dan menunjukkan kesatuan. ayat.
- f. Konstitusi Vollenhoven, yang mengatur tingkatan atas dan bawah klan, kedudukan mereka dalam system hierarki, hak serta tanggung jawab individu, dan tahapan proses setiap klan membuat batas-batas klannya, menggambarkan sifat negara. gram Pasal-pasal UUD memuat hak konstitusional, dasar negara, dan penentu jati diri negara, antara lain lagu akan kebangsaan, Bahasa yang nasional, serta ambang bendera, dan lain-lain.
- g. Adapun Topik lain yang dikaji meliputi hakikat, struktur, dan susunan pemerintahan, cara pemerintah mendelegasikan kekuasaan, batasan-batasan pemerintahan, hakikat hubungan masyarakat dan pemerintah, serta cara proses pelaksanaannya. Lapisan

Masyarakat melakukan haknya (Hasibuan dan Ashari, 2020).

2. Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Tentang MPRS Tekan NO. XX/MPRS/1996, Perjanjian DPR-GR Sumber hukumnya diakui oleh NKRI serta aparat penegak hukumnya. Uraian nya yang tercantum di bawah ini (Arif dan Majid, 2021):

- a. Undang Undang Dasar 1945;
- b. Putusan MPR
- c. Hukum Negara
- d. Putusan Presiden;
- e. Implementasi akan peraturan tersebut; Terstruktur dari Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri.

Segala Ketentuan dalam keputusan MPR ini di anggap tidak sah. Lihat nomor MPR untuk informasi lebih lanjut mengenai segala sumber akan hukum tersebut dan peraturan yang berlaku. III/MPR/2000. putusan MPR mengatur hukum yang di Indonesia sebagai berikut (Ramdhan, 2022):

- a. Undang Undang Dasar 1945;
- b. Putusan MPR;
- c. Undang undang
- d. Putusan atau perintah pemerintah
- e. Keppres;
- f. Segala peraturan yang ada ini sudah tidak sah

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang segala Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dilaukan dan ditata terstruktur berdasarkan segala ketentuan yang ada di bawah ini (Iqbal & Sastrawati, n.d.):

- a. UUD NKRI 1945
- b. Undang Undang
- c. Peraturan Pemerintah, presiden dan Daerah

Ketentuan UU ini di anggap tidak berlaku lagi. peraturan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia diklasifikasikan dan dinilai berdasarkan standar sebagai berikut :

- a. UUD NKRI 1945
- b. Undang Undang
- c. Peraturan Pemerintah, presiden dan Daerah

1. Tujuan, Fungsi, dan Asas Hukum Tata Negara

Tujuan dari hukum tata negara sebagai berikut :

- a. Jawaban: sebelum amandemen, UUD NRA 1945 tersebar luas.
- b. Untuk menaikkan kesadaran masyarakat Rakyat Indonesia akan segala hak dan tanggungjawabnya UUD didasarkan pada UUD NKRI Tahun 1945.
- c. Melakukan cara untuk memahami semua informasi tentang aturan dasardan baru.

- d. Menyuguhkan informasi kepada rakyat Indonesia tentang konstitusi
- e. membuat perluasan terhadap kajian ketatanegaraan Indonesia.
Fungsi Hukum Tata Negara:
 - a. Konstitusi adalah sarana untuk melindungi keselamatan rakyat masyarakat Lahir padaKonstitusise.
 - b. bagai alat untuk membantu pembangunan
 - c. dan memastikan segala bentuk keadilan
 - d. Ciri terpenting dari peraturan dasar adalah tidak adanya penegakan hukum.hanya mengikuti penegakan hukum, bahkan mereka yang melayaninya pun tidakdistrik.

Asas Hukum Tata Negara:

a. Prinsip Pancasila

Konsep Pancasila sebagai sumber kerangka hukum bagi segala peraturan Ketentuan UU Nomor tidak mungkin dilanggar di antaranya bersamanya; Dalam hal ini instruksi harus segera dihentikan. Pancasila pada prinsipnya aturan dasar dapat ditemukan di:

- 1) Landasan monoteisme (Sila Ke-satu).
- 2) Hak asasi Manusia (Sila Ke-dua).
- 3) Yayasan Nasional (Sila Ke-Tiga).
- 4) Fondasi Kedaulatan Manusia (Sila Ke-empat)
- 5) Asas keadilan (Sila Ke-lima)

b. Prinsip kedaulatan manusia

Pengertian kedaulatan dalam UUD dapat diartikan sebagai pengertian yang relatif.dapat ditemukan di negara-negara yang terikat kontrak atau di luar negeriadalah federasi. Adapun Kedaulatan tidak hanya tercakup pada suatu negara yang mempunyai kekuasaan yang absolut baik secara dalam internal maupun eksternal. Kesatuan dalam kekuasaan yang tertinggi suatu negara menghalangi terbentuknya pembagian kedaulatannya. Konsep kedaulatan terhadap rakyat menyatakan bahwa seluruh kekuasaan pemerintahan di usahakan oleh rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. MPR mewakili dalam kedaulatan rakyat. Konstitusi menyuguhkan kekuasaan nyata kepada parlemen, tetapi karena badan ini lambat dan besar, maka badan tersebut didelegasikan kepada badan-badan lain yang berada di bawah kewenangannya.

c. Prinsip supremasi hukumNegara

Berdasarkan hukum yang memastikan keadilan bagi warganya dikatakan negara hukum. Kehidupan warga negara yang bahagia didasarkan pada keadilan, dan dasar keadilan merupakan pendidikan budaya seluruh masyarakat yang menolong mereka menjadi warga negarayang baik. Demikian pula ketertiban hukum akan ada jika hokum dapat mengatur dengan baik hubungan warga negara satu sama lain (Haryanto dan Hadadde, 2021).hal. Prinsip pembagian kekuasaanAda perbedaan antara pengertian pembagian

dan pemisahan kekuasaan.

d. Pemisahan kekuasaan

Mengacu pada pembagian kekuasaan negara ke dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan individu dan tanggung jawabnya. Ada indikasi bahwa pembagian kekuasaan yang kuat tidak mungkin dilakukan. Inilah sebabnya mengapa frase 'pembagian kekuasaan' dipilih; Artinya kekuasaan terbagi menjadi beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Jadi ada kemungkinan kolaborasi antar bidang tersebut.

e. Prinsip Negara Persatuan

Salah satu cara untuk melindungi kedaulatan negara ini adalah dengan membuat undang-undang yang akan melindungi kedaulatan negara. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara republik kesatuan. Hal ini harus dipertimbangkan ketika menyusun Konstitusi. Menurut Konstitusi, segala sesuatu yang dapat menyebabkan perpecahan di negara ini adalah ilegal. Oleh karena itu, menguji kebijakan pemerintah merupakan langkah ke-dalam proses ini, setidaknya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berpotensi menimbulkan keresahan sosial (Jannah dan Fatmawati, 2022).

KESIMPULAN

Bagaimana masyarakat Indonesia menerima hukum Indonesia setelah mengetahui pengertian sistem hukum? . Banyak yang memberikan respons positif. Apa yang telah terjadi? Alasan yang diberikan berbeda-beda. Mereka suka sistemnya, tapi implementasinya tidak sesuai harapan. Ada aturannya tapi tidak dilaksanakan. Apa gunanya mengesahkan undang-undang jika tidak dilaksanakan? Jika masyarakat tidak menaati peraturan, mengapa peraturan lalu lintas ditegakkan? Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia karena, seperti yang mereka katakan, "Oh, kebanyakan hanya sekedar omongan. Ini tidak akan dilaksanakan. 'Sebenarnya di Indonesia, supremasi hukum tergantung pada kita, kita tunduk pada hukum.

Bagaimana pihak berwenang akan menegakkan hukum jika kita sendiri tidak mau tunduk padanya? Jika aturan ini diterapkan dengan benar, maka akan menguntungkan kita juga. Hidup memiliki misi. Dosa bisa dikurangi. Kalau dipikir-pikir, banyak sekali manfaatnya bagikan kita. Jika masyarakat telah menerima hal ini dengan benar, maka perilaku penegak hukum harus mengikuti hal ini. Salah satu penyebab masyarakat tidak peduli terhadap hukum adalah karena penegak hukum tidak menaati hukum dengan baik. Banyak orang mempunyai pengalaman "buruk" dengan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- D.A. (2018). *Peran kinerja inspektorat dalam meningkatkan kinerja pengelola lingkungan hidup di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*. Tinjauan Hukum Sumatera, 1(2).
MI (2022). *Kedudukan Wakil Presiden Menurut Konstitusi Indonesia*.

- Nurwanto, A., Nasution, F.A., Nasution, M., & .. (2022). *Penyelenggaraan urusan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Dasar.Pardosi.*
- Prasetio, R.B. (2021). *Pandemi Covid-19: pertimbangan konstitusional yang mendesak dan perlindungan hak asasi manusia.* Jurnal Ilmu Politik.Ramdhan,
- Rose, D. dan Arliman, L.S. (2017). *Peran dewan desa dalam pembangunan desa dan pengendalian keuangan desa.* Jurnal Hukum Padjadjaran.
- Sarmini, A. (2019). *Kualitas Pelayanan Angkutan (SIM) di Pos Keamanan Karimun I.* Tinjauan Hukum Sumatera, 2(2).